KEBIJAKAN STABILISASI PERUNGGASAN LAYER NASIONAL

DISAMPAIKAN DALAM SEMINAR VIRTUAL POULTRY INDONESIA
5 MARET 2022



DIREKTORAT JENDERAL
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
2022

OUTLINE

I. PENDAHULUAN
   1. PRODUKSI DAN KEBUTUHAN NASIONAL TELUR AYAM RAS TAHUN 2017 - 2022
   2. KONDISI EXISTING, TANTANGAN DAN PELUANG

II. DUKUNGAN REGULASI PERUNGGASAN

III. KEBIJAKAN STABILISASI JANGKA PENDEK, JANGKA MENENGAH DAN JANGKA PANJANG

IV. HARAPAN TERHADAP ASOSIASI PERUNGGASAN





I. PENDAHULUAN

1. PRODUKSI DAN KEBUTUHAN NASIONAL TELUR AYAM RAS TAHUN 2017 - 2022

PRODUKSI DAN KEBUTUHAN TELUR AYAM RAS TAHUN 2017-2022

No	Indikator	Tahun (Ton)					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022*)
1	Konsumsi (kg/kap/thn)	17,69	17,69	17,77	18,35	18,52	19,32
2	Jumlah Penduduk (ribu jiwa)	261.891	265.015	266.912	269.603	272.249	274.859
3	Kebutuhan (ton)	4.632.834	4.688.121	4.742.240	4.947.222	5.043.515	5.310.278
4	Produksi (ton)	4.632.834	4.688.122	4.753.382	5.141.570	5.155.998	5.925.386
5	Neraca (ton)	-	1	11.142	194.348	112.483	615.108

Keterangan:
*) Angka prognosa

Sumber: Ditjen PKH, 2022

PROGNOSA PRODUKSI DAN KEBUTUHAN TELUR AYAM RAS 2022

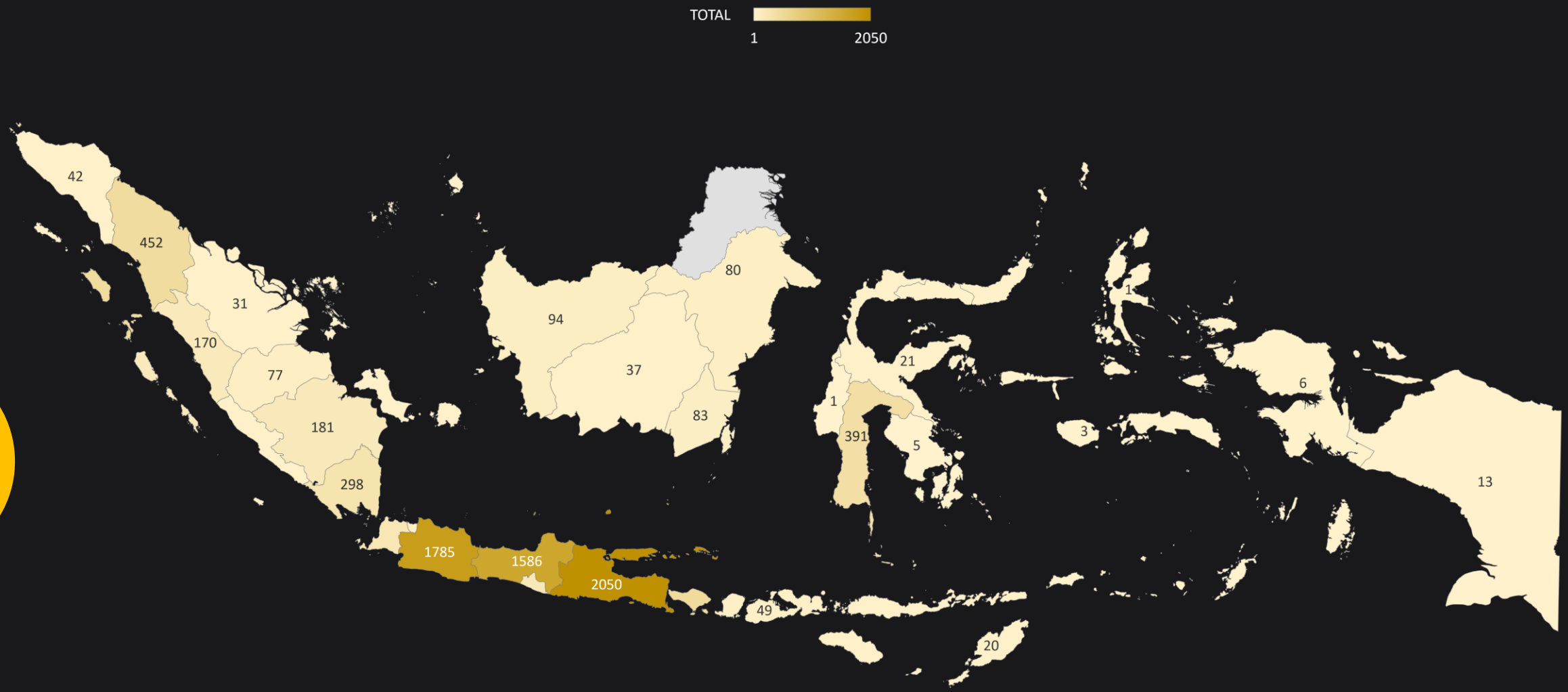
No	Bulan	Populasi FS Umur Muda (ekor)*	Populasi FS Umur Produktif Umur 19-95 mgg (ekor)*	Produksi Per Bulan (Ton)*	Kebutuhan Per Bulan (Ton)**	Neraca (Ton)
1	Januari	99.167.998	291.464.079	476.573	429.095	47.478
2	Februari	98.842.897	299.534.283	456.528	414.285	42.244
3	Maret	99.241.325	301.912.970	522.809	459.755	63.055
4	April	100.513.735	302.967.609	507.712	485.016	22.696
5	Mei	97.459.852	302.862.318	497.842	485.016	12.826
6	Juni	98.580.768	301.667.753	479.882	415.254	64.629
7	Juli	100.539.764	302.827.400	497.785	460.061	37.724
8	Agustus	103.169.449	304.598.712	498.050	429.095	68.955
9	September	102.688.638	302.646.313	478.894	415.254	63.641
10	Oktober	106.569.427	303.896.420	496.902	429.095	67.806
11	November	109.285.121	310.779.315	491.764	415.254	76.510
12	Desember	114.962.726	318.416.797	520.644	473.099	47.545
Total		**102.585.142**	**303.631.164**	**5.925.386**	**5.310.278**	**615.108**

1. Proyeksi konsumsi tahun 2022: 19,32 kg/kapita/tahun
2. Proyeksi jumlah penduduk: 274.859.110 jiwa
3. Proyeksi Kebutuhan Nasional: 5.310.278 ton.

Sumber: Rakor Prognosa, 3 Februari 2022)

Keterangan: *) Populasi berasal dari data produksi DOC FS 3 tahun terakhir, dikelompokkan umur muda dan umur produktif (19-95 minggu)
Produksi per bulan dihitung dari produktivitas telur sesuai umur pada populasi kelompok produktif setiap bulan
**) kebutuhan per bulan dihitung dari kebutuhan kumulatif setahun yang dirinci setiap bulan berdasarkan angka koefiensi konsumsi bulanan dari BKP Kementan.

SEBARAN JUMLAH PETERNAK AYAM RAS PETELUR MENURUT PROVINSI



Data sebaran peternak berdasarkan distribusi DOC FS Layer Tahun 2021





I. PENDAHULUAN

2. KONDISI EXISTING, TANTANGAN & PELUANG

KONDISI EXISTING, TANTANGAN DAN PELUANG

1. Kontribusi produk unggas mencapai 2/3 (dua per tiga) dari konsumsi protein masyarakat Indonesia.
2. Industri unggas dari hulu ke hilir menyerap sampai 10% dari tenaga kerja nasional, dengan omzet mencapai 700 Triliun per tahun.
3. Industri pembibitan tumbuh pesat (19 perusahaan GPS Broiler, 6 perusahaan GPS Layer).
4. Industri pakan terus tumbuh (110 pabrik pakan dengan kapasitas produksi 29.652 juta ton tersebar di 7 Provinsi).
5. Nilai ekspor produk peternakan tahun 2021 adalah 1,043 miliar USD, meningkat 8,21% dibanding tahun 2020 yaitu 964,5 juta USD.
6. Nilai ekspor produk unggas tahun 2021 adalah 2,58 juta USD, sedikit turun 7% dibanding tahun 2020 yaitu 2,79 juta USD tetapi secara volume naik 3%.
7. Prognosa produksi dan kebutuhan telur ayam ras tahun 2022 mengindikasikan adanya potensi surplus sebanyak 615 ribu ton.

KONDISI EXISTING, TANTANGAN DAN PELUANG

7. Harga telur ayam ras berfluktuatif dan cenderung berada di bawah biaya pokok produksi, akibat:
   a. Peternak rakyat tidak memiliki posisi tawar dalam penetapan harga telur walaupun memiliki kontribusi produksi mencapai 98% dari produksi nasional.
   b. Terjadi oversuplai dibulan-bulan tertentu karena menurunnya kebutuhan akibat rendahnya permintaan.
   c. Meningkatnya biaya produksi karena kenaikan harga pakan dan DOC.
   d. Belum ada mekanisme yang dapat memotong rantai pasok telur dari daerah-daerah sentra di Pulau Jawa langsung ke daerah-daerah konsumen.
8. Integrasi vertikal oleh perusahaan perunggasan semakin berkembang namun tidak diimbangi oleh pengembangan industri pengolahan telur.
9. Peternak dihadapkan pada tantangan agar efisien, sehingga bergantung dari penggunaan sarana produksi. Sarana produksi menunjukkan struktur biaya produksi yang membentuk HPP.
10. HPP di tingkat peternak dapat bervariasi mengikuti komponen harga per satuan input sarana produksi seperti bahan baku pakan, variable konversi pakan, produktivitas dan persistensi produksi puncak.



II. DUKUNGAN REGULASI PERUNGGASAN

DUKUNGAN REGULASI UNTUK SEKTOR PERUNGGASAN

1. UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan serta UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
2. PP No. 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak
   Pasal 41 Produksi benih dan/atau bibit dapat dilakukan oleh peternak, perusahaan peternakan, Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota
3. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2013 tentang Budi Daya Hewan Peliharaan Pasal 1 angka 1 Budi Daya Hewan Peliharaan adalah usaha yang dilakukan di suatu tempat tertentu pada suatu kawasan budi daya secara berkesinambungan untuk Hewan Peliharaan dan produk hewan.
4. Permentan No. 32 Tahun 2017 tentang Penyediaan, Peredaran, dan Pengawasan Ayam Ras dan Telur Konsumsi, saat ini tengah dilakukan revisi dengan menekankan kewajiban pendataan peternak ayam ras komersial
5. Permentan No. 14 tahun 2020 tentang Pendaftaran dan Perijinan Usaha Peternakan menyebutkan pada Pasal 13 ayat (2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib untuk melakukan pengembangan usaha pembenihan dan/ atau pembibitan dengan melibatkan peran serta masyarakat untuk menjamin ketersediaan Benih, Bibit, dan/atau bakalan



III. KEBIJAKAN STABILISASI JANGKA PENDEK, JANGKA MENENGAH DAN JANGKA PANJANG

KEBIJAKAN JANGKA PENDEK DAN MENENGAH

1. Langkah SOS melalui gerakan solidaritas penyerapan telur langsung dari peternak rakyat oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah pada saat harga telur jauh dibawah harga acuan.
2. Menjadikan telur sebagai komoditas utama komponen Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan pencegahan stunting oleh Kemensos dan Kemenkes RI.
3. Melaksankan pengendalian suplai melalui himbauan cutting PS layer oleh peternak.
4. Mendorong peternak untuk meningkatkan efisiensi dan menjaga persistensi produksi yang stabil dengan penerapan tata laksana pemeliharaan yang baik.
5. Mendorong Kemenko Perekonomian dan Bapanas untuk mengoptimalkan peran BUMN dan BUMD untuk menyediakan cadangan jagung untuk peternak layer dengan harga sesuai harga acuan Permendag.
6. Mendorong K/L untuk terus meningkatkan promosi konsumsi telur ayam sebagai sumber protein hewani yang terjangkau.

KEBIJAKAN JANGKA PENDEK DAN MENENGAH

7. Mendorong peternak agar menerapkan manajemen *replacement* budidaya layer dengan pengaturan flok, setidaknya setiap peternak dalam satu tahun memiliki 5 umur layer yang berbeda sesuai dengan kapasitas kandang yang dikuasai, untuk mengatur daya serap pasar telur ayam ras menyesuaikan dengan trend HBKN dan kegiatan hajatan masyarakat.
8. Mendorong optimalisasi peran koperasi peternak layer untuk konsolidasi penyediaan jagung dan bahan pakan lainnya. Koperasi harus memiliki gudang pakan memadai sesuai dengan kapasitas layer yang dikuasai oleh seluruh anggotanya.
9. Mendorong penguatan kelembagaan peternak layer melalui koperasi atau kelompok untuk menjalin kerjasama dengan kelompok tani penghasil jagung dan memperkuat pemasaran telur.
10. Mendorong peternak untuk melakukan diversifikasi produksi telur (telur herbal, telur omega, telur organik).

KEBIJAKAN JANGKA PANJANG

1. Penguatan hilirisasi telur ayam ras melalui pengembangan industri pengolahan telur (*liquid egg* dan tepung telur).
2. Penguatan pendataan peternak melalui Sistem Database Perunggasan Nasional Online yang mencakup laporan data produksi dan distribusi DOC FS, dan data seluruh peternak beserta struktur umur layer (standing populasi) di setiap kab/kota.
3. Penyusunan Road Map Industri Perunggasan Nasional yang menjadi peta jalan dalam penataan industri perunggasan sehingga lebih berdaya saing, inklusif dan resilience sekaligus memberikan perlindungan kepada peternak rakyat.
4. Pengaturan regulasi yang lebih tinggi seperti Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden agar tata kelola perunggasan dan pengawasannya dapat dilakukan secara komprehensif dari hulu sampai hilir dengan melibatkan peran berbagai kementerian/lembaga terkait dan mendorong peran bupati/walikota melalui penerbitan Perda/Perbup/Perwali tentang tata kelola perunggasan di wilayahnya.



4. HARAPAN TERHADAP ASOSIASI PERUNGGASAN

PERANAN STRATEGIS ASOSIASI PERUNGGASAN

1. Asosiasi harus berperan aktif membantu anggota nya menerapkan praktek budidaya yang baik (GFP) termasuk pengaturan *flock* dan *replacement* yang terkendali.
2. Asosiasi harus berperan aktif dalam penguatan kelembagaan peternak layer melalui koperasi atau badan usaha lainnya yang solid dan terkonsolidasi secara struktural.
3. Asosiasi sebagai jembatan penghubung antara peternak dengan Pemerintah Daerah setempat terutama dalam hal pendataan peternak.
4. Asosiasi peternak layer meksipun tidak terlibat langsung dalam perhitungan kebutuhan bibit, namun tetap dapat memberikan masukan aspek teknis kepada Pemerintah.
5. Masukan yang diharapkan adalah data parameter produksi di setiap daerah yang diupdate secara berkala untuk menghitung potensi produksi dan penentuan kebutuhan bibit (GPS).



Terima Kasih